

ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU

Halimahtussakdiah¹, NirdukitaRatnawati², Sayfri³

Universitas Islam Riau

e-mail: halimah@eco.uir.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of government outrage and unemployment on poverty in Riau province. The type of data used in this study is secondary data in the form of annual quantitative figures from 2019 to 2022. From the results of this study, it is known that: 1) Government expenditure has a negative effect on poverty in Riau Province, 2) Unemployment has a positive effect on poverty in Riau province.

Keywords: *Government Spending, Unemployment, Poverty...*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penegeluaran pemerintah dan pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi Riau. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk angka kuantitatif tahunan dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1) Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negative terhadap kemiskinan di Provinsi Riau, 2) Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Riau.

Kata kunci: Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran, Kemiskinan.

PENDAHULUAN

Kemiskinan disebut Negara berkembang merupakan persoalan yang selalu menjadi fenomena di sepanjang tahun, salah satunya adalah Indonseia. Kemiskinan bukan hanya hal tinggi rendahnya konsumsi dan pendapatan, tetapi juga bersangkut paut dengan tinggi rendahnya pendidikan, kesehatan dan ketidak mapuan masyarakat miskin untuk ikut didalam proses pembangunan.

Menurut Maipita, 2014 kemiskinan dapat disebabkan oleh (a) rendahnya kualitas angkatan kerja, (b) akses yang sulit dan terbatas terhadap kepemilikan modal, (c) rendahnya tingkat penguasaan teknologi, (d) penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan, (e) pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kemiskinan masih menyebar di provinsi yang ada di Indonesia.

Persentase Penduduk Miskin Provinsi Riau pada tahun 2019-2022

Tahun Penduduk Miskin (%)	
2019	6,90

2020	7.04
2021	7,00
2022	6.84

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi RIAU, 2023

Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kemiskinan diprovinsi riau ialah pengangguran. Pegangguran memiliki andil dalam mempengaruhi kemiskinan. Dimana dapat dibuktikan dari data jumlah pengangguran. Pengangguran bisa terjadi dikarenakan munculnya kesenjangan diantara pembuka lowongan pekerjaan terhadap jumlah pencari kerja yang mencari pekerjaan.

Pengangguran bisa timbul meskipun lowongan pekerjaan banyak, semua itu disebabkan adanya batasan informasi, perbedaan mendasar dalam keterampilan yang ada dari keterampilan yang diperlukan atau mungkin secara sadar memutuskan supaya menganggur, Sukirno (2006). Pengangguran bisa mempengaruhi nilai pendapatan yang sudah didapat selama ini, yang bisa mengakibatkan turunnya nilai kesejahteraan masyarakat. Jika lapangan pekerjaan tidak bisa menerima semua para pencari kerja yang ada, hal itu bisa menambah nilai pengangguran (Mahmud,2016).

Pengangguran di Provinsi Riau Pada Tahun 2019-2022

Tahun	Pengangguran (Jiwa)
2019	84.774
2020	113.177
2021	78.151
2022	54.614

Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan selain pengangguran yaitu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ialah salah satu bagian kebijakan fiskal yang memiliki sebuah tujuan yang akan meningkatkan laju investasi, kesempatan kerja untuk kestabilan ekonomi, dan juga menciptakan distribusi pendapatan yang merata.

Menurut Keynes (Muhammed, 2014), pemerintah dapat mengurangi pengangguran dengan meningkatkan jumlah pengeluaran di perekonomian. Keynes beranggapan perluasan belanja pemerintah bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi

Data Pengeluaran Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2022. (Deskriptif)

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Miliar Rupiah)
2019	8.690,39
2020	8.172,71
2021	8.931,74
2022	9.102,49

Naik turunnya pengeluaran pemerintah dan pengangguran tentu saja bisa mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Riau. Pengeluaran pemerintah yang tinggi diperlukan agar bisa membuka dan menerima tenaga kerja yang pada akhir bisa menurunkan nilai kemiskinan yang ada. Bila jumlah pengangguran disebuah negara cukup tinggi, maka terkadang bisa menaikkan persentase penduduk miskin. Pengangguran dan persentase penduduk miskin harus terus ditekan supaya

kesejahteraan masyarakat bisa lebih merata dan semakin meningkat setiap tahunnya.

LANDASAN TEORI

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan tidak dapat terpenuhi Kemiskinan ialah masalah yang terjadi pada Negara maju maupun Negara berkembang. Kemiskinan dapat terjadi dimana seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dan standar hidup tertentu, Todaro (2006).

Sedangkan Menurut BPS (2016) kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang di ukur dengan pengeluaran.

Menurut Hatitas (2017), terdapat beberapa macam kemiskinan, sebagai berikut:

1. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan akibat modernisasi atau sistem pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak menguasai fasilitas

2. Kemiskinan alamiah

Kemiskinan terkait dengan kelangkaan sumber daya alam, infrastruktur publik dan kemandulan tanah (tanah yang tandus).

2. Ukuran Kemiskinan

Menurut Arsyad (2004) terdapat beberapa macam cara untuk mengukur kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif:

1. Kemiskinan Absolut

Suatu keadaan dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk

meningkatkan kualitas hidup.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif didefinisikan sebagai suatu bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat dari pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan, misalnya jumlah pengangguran per kekurangan pekerjaan..

3. Penyebab Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan tentu merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, kondisi lingkungan, dan faktor lainnya yang berkaitan. Kemiskinan ditandai dengan ketinggalan dan keterbelakangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, rendahnya produktivitas, dan rendahnya pendapatan yang diterima.

Tingkat pendidikan yang rendah juga dapat menjadi pemicu dari kemiskinan, karena masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah cenderung tidak mempunyai keterampilan, wawasan, dan ilmu pengetahuan yang memadai, sehingga tidak dapat bersaing dengan masyarakat yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Hal tersebut lah yang dapat membuat angka kemiskinan dan pengangguran semakin tinggi (bertambah).

Kuncoro (2010) berpendapat bahwa kemiskinan dapat muncul karena adanya faktor-faktor berikut:

1. Pada tingkat mikro, kemiskinan berasal dari kepemilikan sumber daya yang tidak merata, yang mengarah pada distribusi pendapatan yang tidak merata

2. Kemiskinan muncul dari perbedaan kualitas sumber daya manusia, sumber daya manusia yang berkualitas rendah berarti produktivitas rendah, yang pada gilirannya menyebabkan upah rendah.

Kriteria Kemiskinan

Menurut Rahmawati (2011) terdapat berbagai macam kriteria miskin menurut Sayogyo. Dasar pengukuran garis kemiskinan Syogyo adalah pendapat keluarga, yang ditambah dengan nilai harga beras yang berlaku saat itu dan rata-rata anggota rumah tangga. Berdasarkan kriteria tersebut, Sayogyo membagi masyarakat menjadi beberapa kelompok:

1. Sangat Miskin

Kelompok ini termasuk mereka yang pendapatannya setara dengan 240 kg setara beras per orang per tahun, penduduk yang tinggal di perkotaan.

2. Miskin

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang berpendapatan setara dengan 240 kg beras sampai 320 kg beras selama setahun untuk penduduk yang tinggal di desa, sedangkan untuk penduduk yang tinggal di perkotaan berkisar 360 sampai 480 kg.

3. Hampir cukup

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang pendapatannya setara dengan 320 kg beras sampai 480 kg beras dalam setahun untuk penduduk yang tinggal di pedesaan, serta diatas 720 kg untuk penduduk yang tinggal di perkotaan.

4. Cukup

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang pendapatannya lebih dari 480 kg beras tiap orang dalam setahun untuk penduduk yang tinggal di pedesaan, dan di atas 720 kg beras setiap orang per tahun untuk yang tinggal di perkotaan.

3. Pengangguran

Pengangguran ialah orang yang bisa dikatakan sebagai pencari kerja yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan dan saat ini mencari pekerjaan.

Dalam sensus penduduk 2001 mendefinisikan pengangguran sebagai orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan (BPS, 2022).

Menurut Yanuar (2009) pengangguran adalah keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Menurut Badan Pusat Statistik angkatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja dan yang tidak bekerja berumur lebih dari 15 tahun.

Menurut Hasyim (2017:197) pengangguran merupakan masalah strategi dalam perekonomian secara makro, karena berpengaruh langsung kepada standar kehidupan dan tekanan psikologis masyarakat.

Pengangguran bisa disebut juga seseorang yang masuk ke dalam kategori tenaga kerja yang tidak sedang bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Karena itu, Sadono Sukirno (2006) membagi pengangguran menjadi beberapa bagian menurut keadaan dan penyebabnya:

1) Pengangguran Friksional

Terjadi karena tidak bertemunya antara penyediaan lowongan pekerjaan dengan pencari kerja yang dikarenakan oleh tidak adanya sarana informasi, geografi, dan lainnya.

2) Pengangguran Struktural

Terjadi karena adanya perubahan struktur perekonomian.

3) Pengangguran konjungtur

Terjadi karena naiknya pengangguran alamiah.

A. Ciri-ciri Pengangguran

Ada beberapa ciri-ciri pengangguran antara lain:

1) Pengangguran terbuka

Angkata kerja yang mampu dan mendambakan pekerjaan tetapi tidak mendapat pekerjaan yang cocok

2) Setengah menganggur

Angkatan kerja yang bekerja secara produktif namun kreativitasnya rendah.

3) Tenaga kerja yang lemah

Tenaga kerja yang bekerja secara produktif namun penghasilannya rendah karena disebabkan oleh kondisi kesehatan.

4) Tenaga kerja yang tidak produktif

Tenagakerja yang produktif namun tidak mendapatkan penghasilan yang sesuai.

B. Dampak Pengangguran

Sukirno(2006) berpendapat bahwasannya pengangguran dapat menimbulkan dampak buruk yang dibedakan dalam dua aspek, sebagai berikut:

1. Dampak pengangguran terhadap perekonomian

- a. Menyebabkan penerimaan pajak negara yang lebih rendah
- b. Tidak mendorong pertumbuhan ekonomi
- c. Bisa menghambat masyarakat untuk memaksimalkan pendapatan nasional yang sebenarnya lebih kecil dari pendapatan nasional.

2. Dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat

- a. Hilangnya mata pencaharian dan pendapatan
- b. Hilangnya keterampilan
- c. Pengangguran Menimbulkan masalah social di masyarakat.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah (publik) ialah sumberdaya ekonomi yang dikuasai oleh

pemerintah dan diselenggarakan dengan cara tidak langsung oleh masyarakat.

Pengeluaran publik ialah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu tindakan pemerintah yang bertujuan untuk menata berjalannya perekonomian dengan menetapkan tingkat penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahun, yang tercermin dalam penerimaan dan pengeluaran nasional, Sadono Sukirno (2006)

Pengeluaran pemerintah berfungsi agar mampu mewujudkan permintaan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana yang tidak mampu diwujudkan oleh swasta (Suparmoko, 2000).

Pengeluaran dibagi menjadi dua golongan yaitu:

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran yang terus menerus tiap tahunnya dilaksanakan pemerintah untuk menyelenggarakan dan menjaga bagian pemerintah yang terdiri dari: belanja pegawai, yaitu untuk pembiayaan gaji pegawai yaitu gaji pokok dan tunjangan.

2. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk pengeluaran fisik dan non fisik untuk menambah modal masyarakat. Contoh pembangunan fisik ialah pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit. Sedangkan pembangunan nonfisik ialah seperti pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. kemiskinan.

Jumlah pengeluaran pemerintah yang bakal dilaksanakan dalam suatu periode tertentu tergantung kepada banyaknya faktor, yang terpenting diantaranya yaitu:

1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima
Faktor terpenting untuk memutuskan besarnya jumlah pengeluaran ialah jumlah pajak yang diramalkan. Untuk mengatur anggaran belanja pemerintah mesti terlebih dahulu melaksanakan prediksi tentang jumlah pajak uang yang telah diterima.

Semakin banyak jumlah pajak yang sudah diterima maka semakin banyak pula perbelanjaan yang bisa dilakukan.

2. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai

Peran pemerintah sangat penting didalam perekonomian. Ada beberapa tujuan yang penting dalam gerakan pemerintah yaitu mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi dan mempersingkat pembangunan ekonomi dalam jangka waktu yang sangat panjang.

Belanja publik mencerminkan kebijakan pemerintah. Jika belanja publik telah menerapkan kebijakan pembelian jasa dan barang, belanja publik bisa menunjukkan banyaknya jumlah yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bisa melakukan kebijakan tersebut. Teori belanja publik bisa diklasifikasikan menjadi dua: teori makro dan teori mikro. Pada teori makro, belanja publik terdiri dari faktor-faktor yang mendorong pemerintah untuk membeli jasa dan barang. Sedangkan teori mikro terdiri dari pembelian barang dan jasa, belanja publik untuk gaji pegawai dan transfer (subsidi, dana pensiun, dll), Guritno (2001:169).

Menjaga Tingkat Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memberikan dampak yang luas pada segala aspek kehidupan, peningkatan pendapatan merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Memicu pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan akhir kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sehingga pemerintah akan mengarahkan segala kebijakan guna mencapai tujuan tersebut (Nasution, 2000:343).

Adanya kegiatan pemerintah untuk mencapai distribusi pendapatan yang merata, kegiatan untuk memepertahankan stabilitasi ekonomida kegiatan untuk mencapai

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan mendorong pemerintah untuk aktif membuat perencanaan dan melaksanakannya demi tercapainya tujuan-tujuan tersebut (Suparmoko, 2000:343).

Telah kita pahami bahwa pemerintah perlu campur tangan dalam perekonomian. Sejauh mana campur tangan pemerintah di Negara kita, adalah sektor swasta baik secara pribadi maupun perusahaan tetap diberi kebebasan untuk berkembang, tetapi dibawah pengawasan pemerintah. Pemerintah tidak mengambil bagian terlalu jauh dalam perekonomian, artinya hanya kegiatan-kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh swasta.

1. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan

Pengeluaran pemerintah bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam proyek-proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang. Upaya penanggulangan kemiskinan juga tidak lepas dari jumlah pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jika pengeluaran pemerintah terus naik dari tahun ke tahun maka diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

2. Hubungan Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Ada keterkaitan antara pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran yang meningkat dapat menimbulkan dampak yang buruk kepada perekonomian sebuah daerah, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan maka tidak dapat menghasilkan jasa dan barang. Hal tersebut juga dapat menyebabkan penurunan pendapatan perkapita. Jika pendapat perkapita rendah itu akan mengakibatkan tingkat

kesejahteraan menurun dan meningkatnya persentase penduduk miskin, persentase penduduk miskin akan meningkat apabila pengangguran bertambah. Hal yang dapat terjadi yang disebabkan oleh pengangguran adalah berkurangnya pendapatan masyarakat dan kesejahteraan yang telah dicapai oleh masyarakat (Mulyadi, 2012).

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa time series selama 4 tahun dari tahun 2019-2022, sehingga populasi dan sampel tidak dipakai dalam penelitian ini.

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diterapkan didalam penulisan ialah dengan dokumentasi. Dokumentasi ialah data yang terdapat di BPS dalam bentuk laporan tahunan yang telah dipublikasikan dan dalam buku-buku referensi, jurnal-jurnal dan sebagainya.

2. Definisi Variabel Penelitian Variable dalam penelitian ini ialah:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas ialah variabel yang berpengaruh karena adanya variabel terikat. Oleh karena itu yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini yaitu:

a). Pengeluaran Pemerintah (X_1)

Pengeluaran Pemerintah adalah suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam APBN dan APBD.

.b). Pengangguran (X_2)

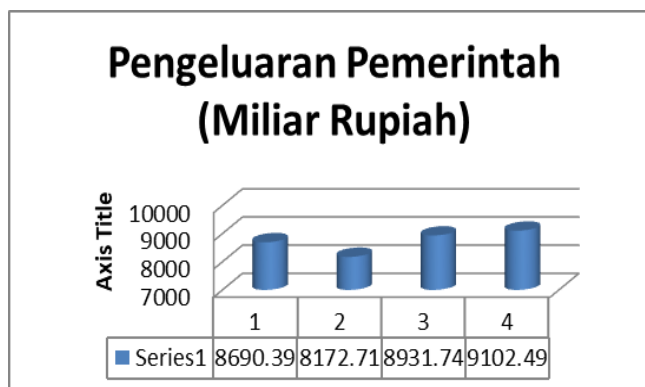
Pengangguran ialah orang yang dikatakan sebagai tenaga kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapat pekerjaan dan yang sedang mencari pekerjaan.

b. Variabel Terikat

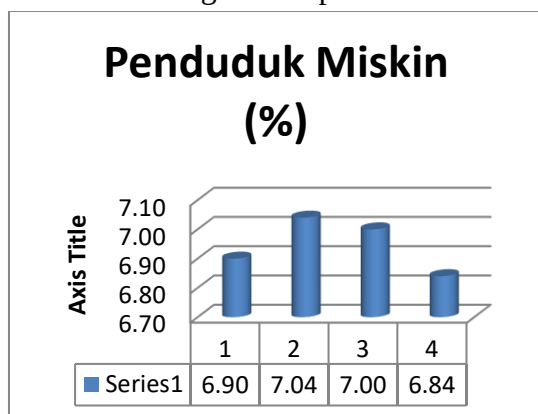
Variabel terikat yaitu variabel yang telah dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Oleh karena itu yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini ialah kemiskinan (Y), kemiskinan merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan (GK), yang diperoleh dari hasil survey (sampel). Angka kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro dan merupakan hasil susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

PEMBAHASAN:

Melihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh pengeluaran pemerintah dan pengangguran terhadap kemiskinan diProvinsi Riau pada pembahasan ini sebagai berikut:



Gambar 1: Pengeluaran pemerintah2019-2022



Gambar 2: Penduduk Miskin2019-2022

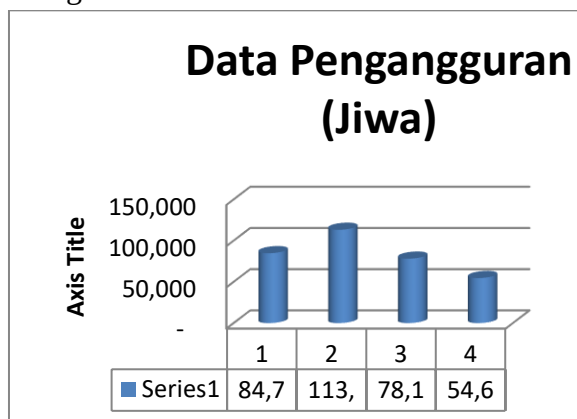
Berdasarkan gambar grafik 1 dapat dijelaskan bahwa Pengeluaran pemerintah di Provinsi Riau Tahun 2019-2022 yang paling rendah terdapat pada tahun 2020 yaitu sebesar 8.172,71 Miliar rupiah. Pada tahun 2022 merupakan Pengeluaran pemerintah yang tertinggi yaitu sebesar 9.102,49 Miliar rupiah di Provinsi Riau. Sementara angka kemiskinan dari data yang diperoleh menunjukkan hal yang sebaliknya dapat di lihat pada gambar grafik 2 dimana tingkat kemiskinan tertinggi dengan presentasi 7,04% di tahun 2020 sementara kemiskinan terendah di tahun 2022 sebesar 6,84%.

Penyebab Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, kondisi lingkungan, dan faktor lainnya yang berkaitan. Kemiskinan ditandai dengan ketinggalan dan keterbelakangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, rendahnya produktivitas, dan rendahnya pendapatan yang diterima.

Di lihat dari data pengeluaran pemerintah yang tinggi hal tersebut diperlukan agar bisa membuka dan menerima tenaga kerja yang pada akhir bisa menurunkan nilai kemiskinan yang ada. Terlihat dari data dan grafik yang ditampilkan pada gambar 1 dan 2 adanya pengaruh negative dari variabel pengeluaran pemerintah dengan kemiskinan.

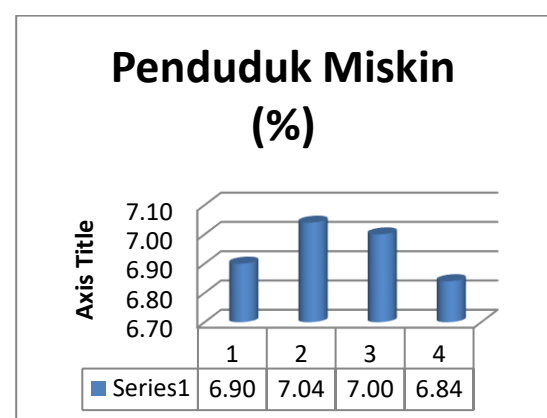
Menurut Keynes (Muhammed, 2014), pemerintah dapat mengurangi pengangguran dengan meningkatkan jumlah pengeluaran di perekonomian. Keynes beranggapan perluasan belanja pemerintah bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan selain pengeluaran pemerintah yaitu pengangguran.

Variabel Pengangguran terhadap kemiskinan dapat kita lihat dari gambar grafik 3 dan 4 sebagai berikut:



Gambar 3: Pengangguran 2019-2022

Berdasarkan gambar grafik 3 dapat dijelaskan bahwa Pengangguran di Provinsi Riau Tahun 2019-2022 yang paling rendah terdapat pada tahun 2022 yaitu sebesar 54.614 jiwa. Dan pengangguran yang tertinggi ditahun 2019 yaitu sebesar 113.177 jiwa. Hal ini dapat berdampak pada tingkat kemiskinan dimana tingkat kemiskinan akan semakin tinggi jika data pengangguran juga semakin besar atau bertambah. Data terkait kemiskinan dapat di lihat pada gambar grafik 4 sebagai berikut:



Gambar 1: penduduk Miskin 2019-2022

Dikarenakan data pengangguran di tahun 2019 meningkat 113.177 jiwa, maka terdapat pengaruh terhadap tingkat kemiskinan hal ini terlihat dari data kemiskinan yang naik

menjadi 7,04% di tahun 2019. sedangkan tahun-tahun berikutnya berkurang antara pengangguran dengan tingkat kemiskinan setiap tahunnya diprovinsi riau, dan hal tersebut sejalan dengan teori terkait pengangguran dan juga kemiskinan.

SIMPULAN

1.Variabel Pengeluaran Pemerintah jika dilihat dari gambar grafik berpengaruh negative terhadap Kemiskinan di Provinsi Riau, hal ini terlihat dari perubahan yang terjadi Dari tahun-tahun 2019 sampai 2022. Hal ini juga cocok dengan landasan teori dan hipotesis yang dipakai pada penelitian ini, dimana Pengeluaran Pemerintah mengalami kenaikan maka akan searah dengan turunnya kemiskinan.

2.Variabel Pengangguran (X_2) berpengaruh secara positif terhadap kemiskinan di Provinsi Riau. Pengaruh positif tersebut artinya apabila pengangguran naik maka nilai kemiskinan di Provinsi Riau juga akan naik sebesar dan begitupun sebaliknya, apabila pengangguran turun maka kemiskinan di Provinsi Riau juga akan turun.

Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, bahwasannya jika pengangguran meningkat maka kemiskinan juga naik, jika pengangguran menurun maka kemiskinan juga akan turun.

Menurut Hasyim (2017:197) pengangguran merupakan masalah strategi dalam perekonomian secara makro, karena berpengaruh langsung kepada standar kehidupan dan tekanan psikologis masyarakat. Sedangkan menurut Nanga (2001:253) pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang

mencari pekerjaan. Jika hal ini terjadi maka angka kemiskinan akan bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin. Ekonomi Pembangunan. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP TIM YKPN. 2004.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2022), Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2022.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2022), Persentase Penduduk Miskin Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2022.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2022), Jumlah Pengangguran Bermur 15 Tahun keatas Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2022.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2022), Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2022.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2022), Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2022.

Mulyadi, 2016, Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Nasution, Mulia (2000). Teori Ekonomi Makro: Pendekatan Pada Ekonomi Indonesia. Jakarta: Djambatan.

Rahmawati, Nur Indah. (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah), Skripsi.

Diperoleh tanggal 17 Maret 2014 dari <http://eprints.undip.ac.id/22587/1/>

Suparmoko, M (2000), Pokok-pokok Ekonomika. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada

Sukirno, Sadono (2006), Makro Ekonomi Teori Pengantar. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Todaro, Michael P, 2006. Pembangunan Ekonomi: Di Dunia Ketiga edisi 9, Jakarta: Penerbit Erlangga. Alih Bahasa Drs. Haris Munandar

Maipita, Indra, & Fitrawaty. (2014). MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSIPENDAPATAN. UPP STI YKPN